



RLPPD

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



Bupati Bantul
H. Abdul Halim Muslih

Wakil Bupati Bantul
H. Aris Suharyanta, S.Sos., M.M.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua
Shalom, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Bantul yang saya hormati dan cintai. Puji dan syukur kehadiran *Allah Subhanahu Wata'ala* atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Penyusunan dan penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD ini merupakan perwujudan dari kewajiban kami sebagai Bupati Bantul kepada masyarakat Kabupaten Bantul serta merupakan tanggung jawab pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah wajib menyampaikan RLPPD kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bantul merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran, dan selama tahun 2025, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik dan lancar.



GAMBARAN UMUM DAERAH

VISI DALAM RPJMD 2021-2026

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

MISI DALAM RPJMD 2021-2026

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

VISI DALAM RPJMD 2025-2029

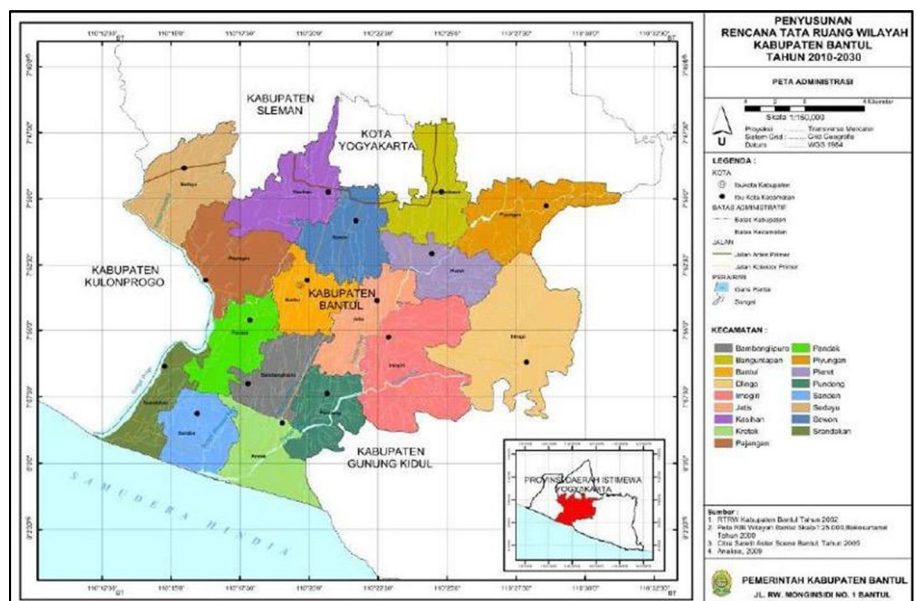
Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa

MISI DALAM RPJMD 2025-2029

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

Luas wilayah: 511,527 Km2
Terbagi atas 17 Kapanewon dan 75 Kalurahan

No	Kapanewon	Jumlah Kalurahan
1	Srandakan	2
2	Sanden	4
3	Kretek	5
4	Pundong	3
5	Bambanglipuro	3
6	Pandak	4
7	Bantul	5
8	Jetis	4
9	Imogiri	8
10	Dlingo	6
11	Pleret	5
12	Piyungan	3
13	Banguntapan	8
14	Sewon	4
15	Kasihan	4
16	Pajangan	3
17	Sedayu	4

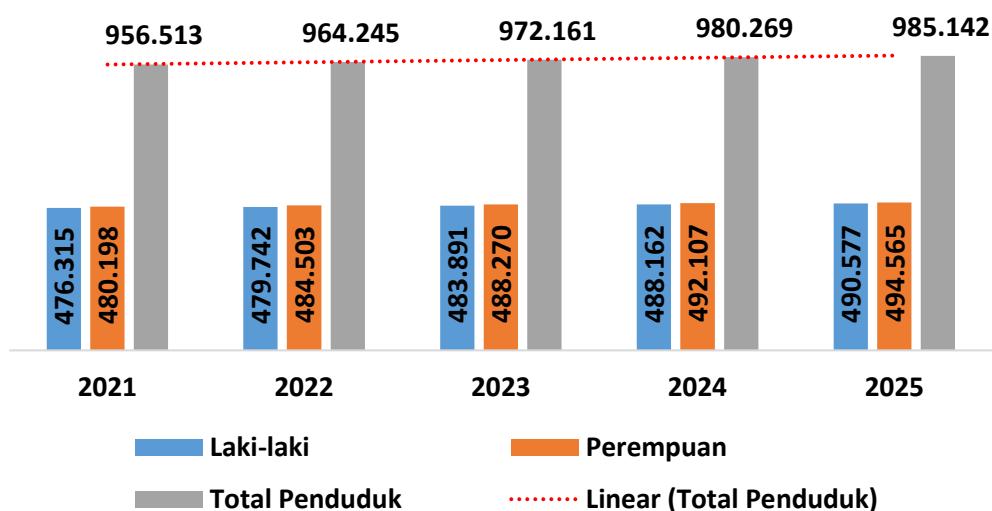


Peta Administrasi Kabupaten Bantul

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024



Pertumbuhan Penduduk 2021-2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2026

I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh Kabupaten Bantul pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	82,05	83,03	1,19
2	Angka Kemiskinan (persen)	11,66%	11,54%	-1,03
3	Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka)	3,62%	3,57%	-1,38
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,04%	4,92%	-2,38
5	Pendapatan per Kapita (PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)) (Ribu Rupiah)	35.843,00	38.187,39	6,54
6	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,417	0,427	2,40

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2026



II. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, yaitu meliputi urusan pendidikan; urusan kesehatan; urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; urusan perumahan dan kawasan permukiman; urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial.

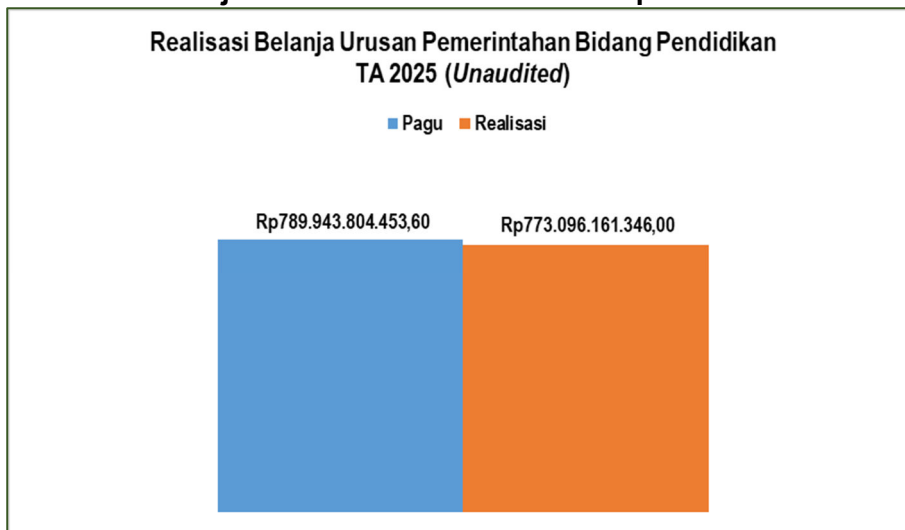
Capaian kinerja urusan pelayanan dasar yang diperoleh Kabupaten Bantul pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	100,771%	100,00%
2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar *)	n/a	100,00%
3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99,907%	99,97%
4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik *)	n/a	65,45%
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik *)	n/a	63,44%
*) Indikator baru yang berlaku mulai Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026, Tgl. 27 Januari 2026, sehingga capaian indikator dimaksud pada Tahun 2024 tidak dapat disajikan.			
Sumber: Dinas DIKPORa Kabupaten Bantul, 2026; https://silppd.kemendagri.go.id/			

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2025



Persen Realisasi
97,87%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, cut off data per 23 Januari 2026 (unaudited)

C. Permasalahan Urusan Pendidikan yang Dihadapi di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Belum optimalnya koordinasi data secara terpadu dan komprehensif dengan provinsi lain tentang data warga Kabupaten Bantul yang telah terlayani sebagai peserta didik di satuan pendidikan di provinsi lain.

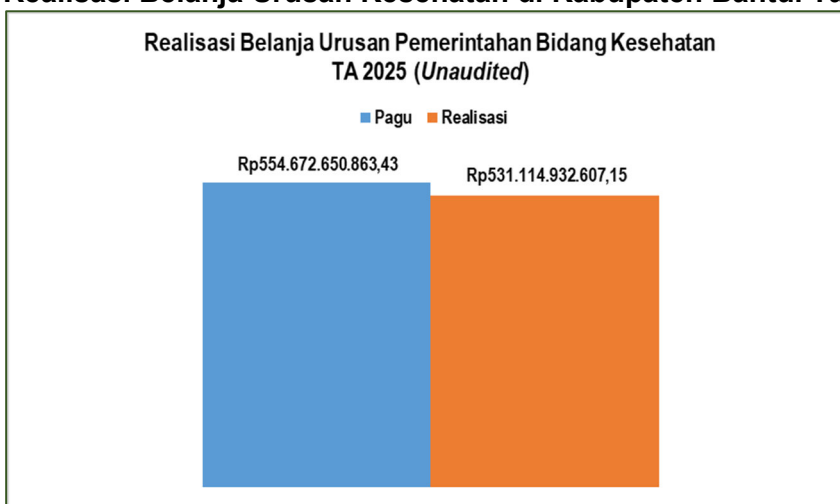


2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase kematian ibu *)	n/a	0,11%
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita *)	n/a	9,05%
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	98,339%	92,46%
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	99,947%	93,86%
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	84,294%	99,19%
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	94,027%	93,66%
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100,000%	100,00%
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	99,489%	100,00%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,002%	100,00%
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	94,354%	100,00%
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	86,753%	100,00%
12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	99,116%	100,00%
13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100,000%	100,00%
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100,000%	100,00%
*) Indikator baru yang berlaku mulai Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026, Tgl. 27 Januari 2026, sehingga capaian indikator dimaksud pada Tahun 2024 tidak dapat disajikan.			
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2026; https://silppd.kemendagri.go.id/			

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2025



Persen Realisasi
95,75%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, cut off data per 23 Januari 2026 (unaudited)

C. Permasalahan Urusan Kesehatan yang Dihadapi di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Belum optimalnya koordinasi data secara terpadu dan komprehensif dengan wilayah administrasi lain (antar Kabupaten/Kota/Provinsi) serta dengan fasilitas kesehatan swasta tentang data warga Kabupaten Bantul yang telah terlayani sebagai pasien di fasilitas kesehatan di wilayah administrasi lain atau swasta.

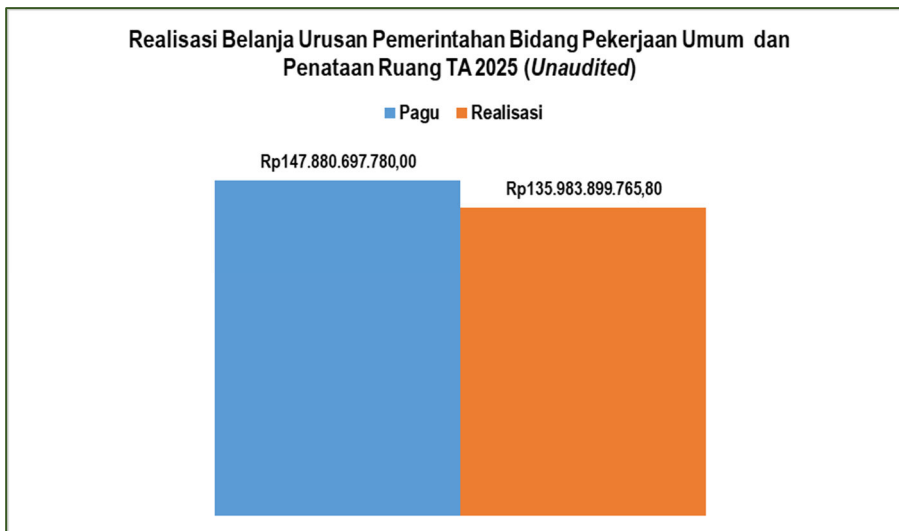


3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota *)	n/a	65,60%
2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	64,979%	65,87%
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	100,000%	100,00%
4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,000%	100,00%
5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota *)	n/a	100,00%
8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah *)	n/a	100,00%
9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	94,591%	39,58%
10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota *)	n/a	17,86%
*) Indikator baru yang berlaku mulai Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026, Tgl. 27 Januari 2026, sehingga capaian indikator dimaksud pada Tahun 2024 tidak dapat disajikan.			
Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul, 2026; https://silppd.kemendagri.go.id/			

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bantul Tahun 2025



Terdapat efisiensi anggaran yang bersumber dari selisih nilai kontrak dan pagu anggaran. Semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan lancar, selesai tepat waktu.

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, cut off data per 23 Januari 2026 (unaudited)



C. Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Dihadapi di Kabupaten Bantul Tahun 2025

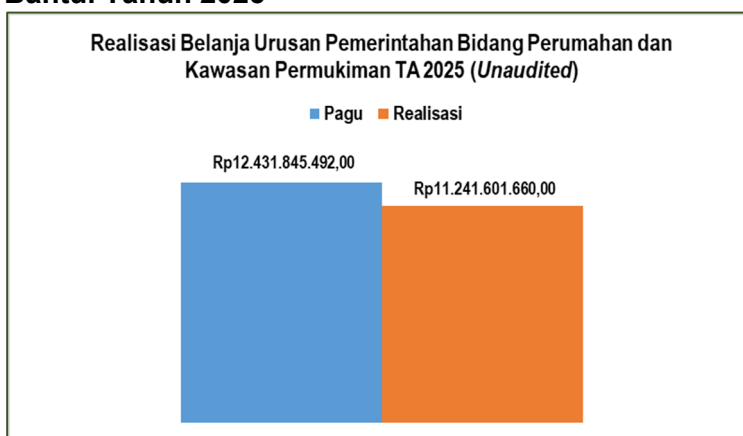
- Terdapat selisih yang cukup signifikan dalam Capaian Indikator Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2024 dan Tahun 2025 karena adanya perbaikan data tahun 2025 yaitu hanya menghitung sertifikat kompetensi dengan nomor sertifikat yang lengkap dan sah.
- Capaian indikator persentase penilaian pelaksanaan KKPR berdasarkan KKPR yang sudah diterbitkan belum optimal karena penilaian difokuskan pada KKPR yang telah memiliki masa berlaku lebih lama sebagai prioritas lokasi yang telah dimungkinkan mengalami pembangunan fisik.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Tidak ada rumah terdampak bencana di Kabupaten Bantul selama tahun 2024	Tidak ada rumah terdampak bencana di Kabupaten Bantul selama tahun 2025
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	46,251%	83,18%
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani *)	0,733%	19,74%
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum *)	9,017%	PSU dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya sehingga s.d. tahun 2025 belum terdapat kegiatan pemeliharaan oleh Pemkab.
*) Elemen data dalam rumus indikator berbeda antara Tahun 2024 dan Tahun 2025, capaian Tahun 2025 menggunakan elemen rumus baru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026, Tgl. 27 Januari 2026, sehingga capaian indikator dimaksud pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak dapat disandingkan.			
Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul, 2026; https://silppd.kemendagri.go.id/			

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2025



Persen Realisasi
90,43%

Terdapat efisiensi anggaran yang bersumber dari selisih nilai kontrak dan pagu anggaran; serta alokasi anggaran untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 25 unit, tidak dapat direalisasikan karena tidak ada rumah terdampak bencana yang perlu memperoleh layanan rumah layak huni. Semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan lancar, selesai tepat waktu.

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, cut off data per 23 Januari 2026 (unaudited)

C. Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Dihadapi di Kabupaten Bantul Tahun 2025

- Telah disediakan alokasi anggaran untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 25 unit, namun sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat direalisasikan karena tidak ada rumah terdampak bencana yang perlu memperoleh layanan rumah layak huni.
- PSU Perumahan yang diserahkan dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya sehingga sampai dengan tahun 2025 belum terdapat kegiatan pemeliharaan.

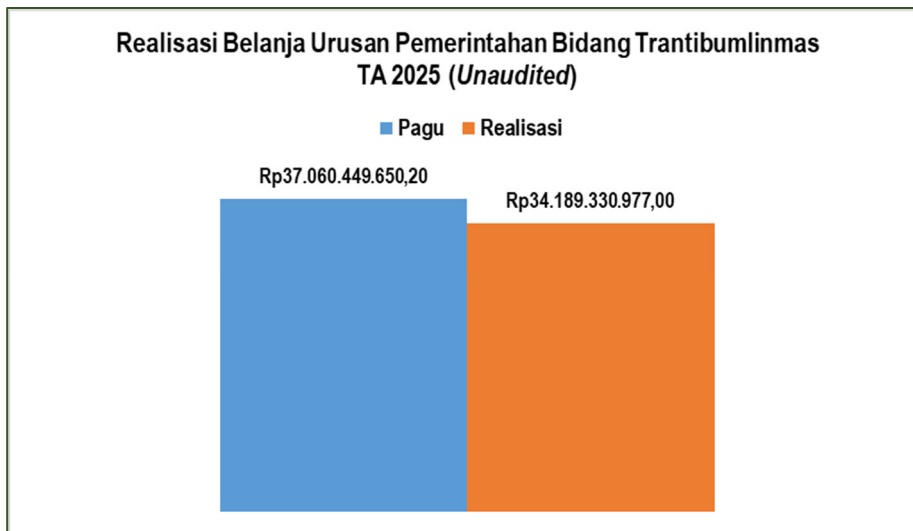


5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)

A. Capaian Kinerja Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku *)	n/a	100,00%
2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100,00%	100,00%
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100,00%	100,00%
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	42,598%	100,00%
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00%	100,00%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00%	88,46%
*) Indikator baru yang berlaku mulai Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026, Tgl. 27 Januari 2026, sehingga capaian indikator dimaksud pada Tahun 2024 tidak dapat disajikan.			
Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul, 2026; BPBD Kabupaten Bantul, 2026; https://silppd.kemendagri.go.id/			

B. Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Bantul Tahun 2025



Persen Realisasi
92,25%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, cut off data per 23 Januari 2026 (unaudited)

C. Permasalahan Urusan Trantibumlinmas yang Dihadapi di Kabupaten Bantul Tahun 2025

- Perbedaan definisi operasional dan data pendukung pada indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2024 dan 2025 menyebabkan capaian kinerja berbeda cukup signifikan antara tahun 2024 dan 2025.
- Masih terdapat 24 kejadian kebakaran yang tidak dapat memenuhi *response time* disebabkan lebih dari setengah kejadian berlokasi lebih dari 7,5 km dari Pos Pemadam dan 14 kejadian berupa kebakaran jaringan listrik PLN, sampah, dan kendaraan di jalan.

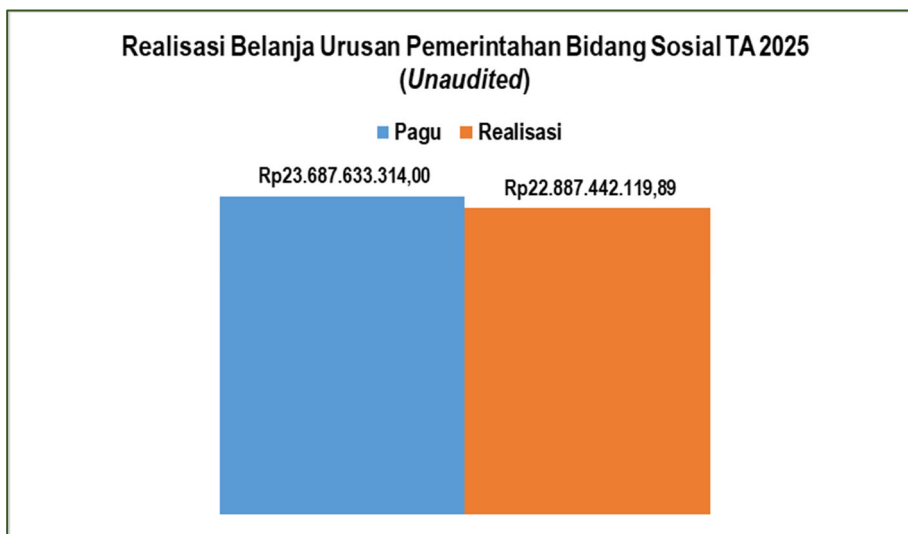


6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00%	100,00%
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00%	100,00%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00%	100,00%
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00%	100,00%
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100,00%	100,00%
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar *)	n/a	100,00%
*) Indikator baru yang berlaku mulai Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026, Tgl. 27 Januari 2026, sehingga capaian indikator dimaksud pada Tahun 2024 tidak dapat disajikan.			
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2026; https://silppd.kemendagri.go.id/			

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2025



Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, cut off data per 23 Januari 2026 (unaudited)

C. Permasalahan Urusan Sosial yang Dihadapi di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Rincian komponen biaya alat bantu spesifik yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 belum dapat dihitung secara optimal. Kebutuhan alat bantu untuk difabel tidak dapat dianggarkan di awal perencanaan secara spesifik karena kebutuhan alat bantu untuk difabel dengan spesifikasi rinci dan tertentu, harus diukur terlebih dahulu (antara lain alat bantu pendengaran, alat bantu mata, dan alat bantu kaki palsu). Ketersediaan alat bantu yang dapat direncanakan dalam penganggaran berupa alat bantu yang bersifat universal (kursi roda, tongkat putih, dan kruk).



III. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA



1. Hasil EPPD Tahun 2024 Berdasarkan LPPD Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2019 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, tanggal 21 April 2025, Kabupaten Bantul berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan **skor kinerja 3,4254 dan status kinerja Tinggi**.

(Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2025 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 belum ditetapkan)

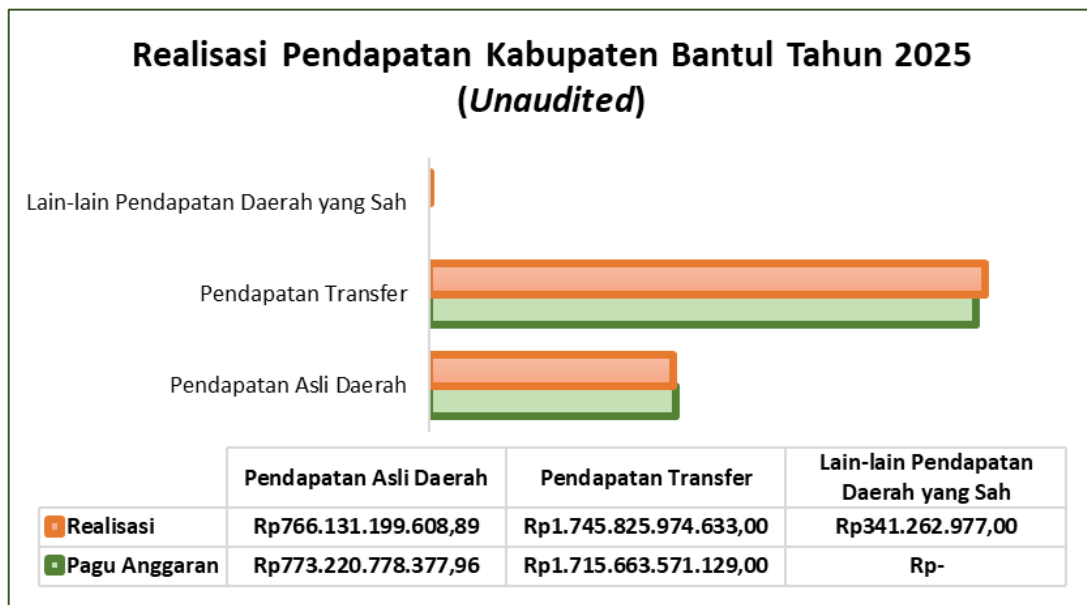


2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Menurut opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024, Nomor 9A/LHP/XVIII.YOG/04/2025, tanggal 14 April 2025, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

IV. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

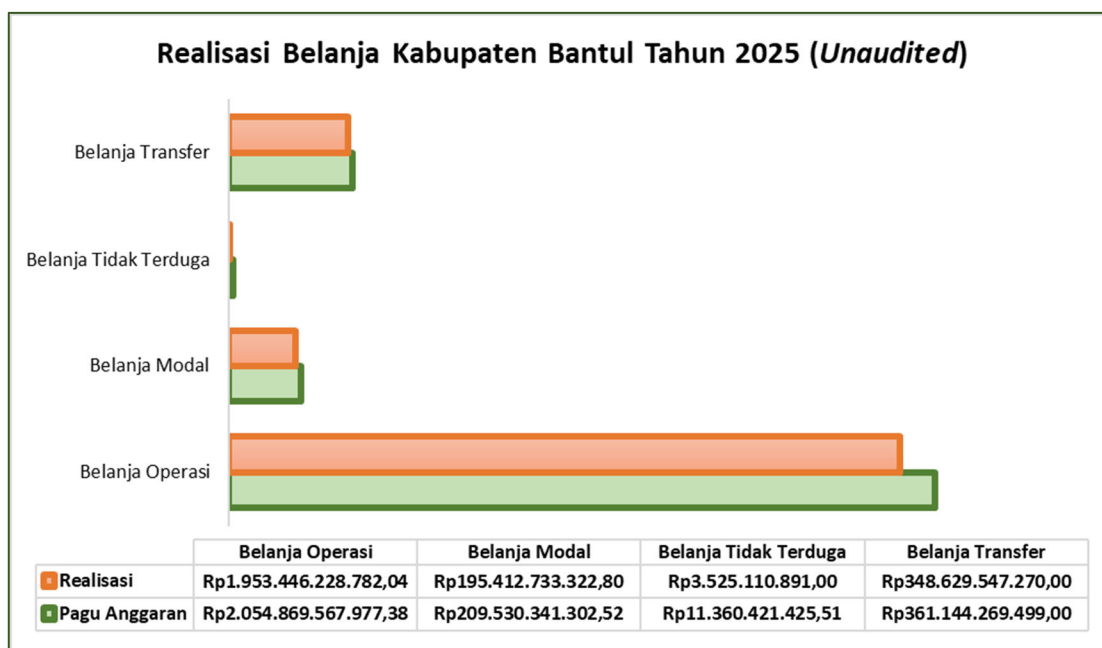
Anggaran pendapatan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebesar Rp2.488.884.349.506,96 terealisasi sebesar Rp2.512.298.437.218,89 atau mencapai 100,94% (*unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:



Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, cut off data per 23 Januari 2026 (*unaudited*)

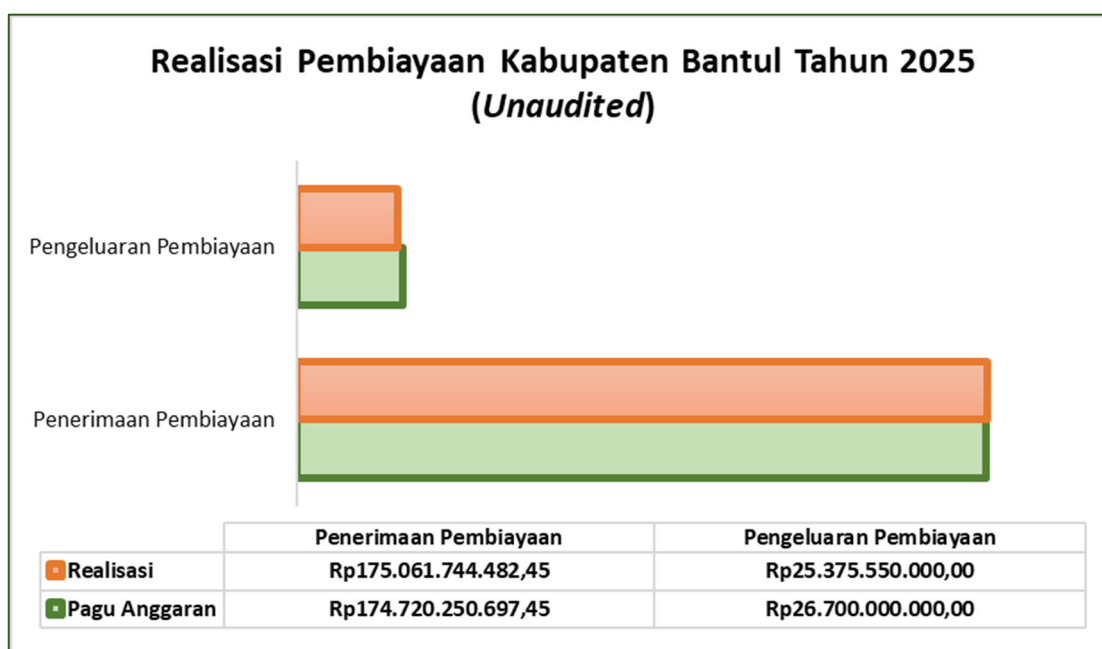


Anggaran belanja Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebesar Rp2.636.904.600.204,41 terealisasi sebesar Rp2.501.013.620.265,84 atau mencapai 94,84% (*unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:



Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, *cut off data* per 23 Januari 2026 (*unaudited*)

Anggaran pembiayaan netto Kabupaten Bantul Tahun 2025 (penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan) sebesar Rp148.020.250.697,45 terealisasi sebesar Rp149.686.194.482,45 atau mencapai 101,12% (*unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:



Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, *cut off data* per 23 Januari 2026 (*unaudited*)



V. INOVASI DAERAH

Inovasi daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal. Terdapat 43 inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan/atau Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul, dan masih dimanfaatkan pada Tahun 2025, yaitu:

No	PD / UPTD / UOBK	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi	Nama Inovasi
1.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Inovasi Lainnya	Digital	1. Aplikasi E-Pemilos EVOSS (<i>Electronic Voting System for Students</i> : Pemilihan ketua OSIS SMP dan SMA sederajat)
		Tata Kelola Pemerintahan	Digital	2. PANDU (Pendataan Aset Terpadu)
2.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pelayanan Publik	Digital	3. BAYAR PAKDE QRIS (Bayar Pajak Dengan QRIS)
		Pelayanan Publik	Digital	4. BAYAR PAJAK MUDAH NGGAK BIKIN GERAH (Pembayaran Pajak Daerah dengan Virtual Account)
		Pelayanan Publik	Digital	5. PELAYANAN VALIDASI 24 JAM BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
3.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan	Digital	6. APLIKASI CINTA ANAK BANTUL (<i>Creating and collaborating attempt for anak-anak Bantul</i> : CINTA ANAK BANTUL, sebagai Sistem Informasi Manajemen Data, Proses Kinerja, Media Evaluasi dan Hasil Kinerja Percepatan Kabupaten Bantul Layak Anak)
		Tata Kelola Pemerintahan	Digital	7. APLIKASI SISTEM INFORMASI TERPADU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (SIP CSR) MEMBANGUN BANTUL
		Pelayanan Publik	Digital	8. MAKIN SIB (Meningkatkan Kualitas Inovasi Melalui Studio Inovasi Bantul)
4.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tata Kelola Pemerintahan	Digital	9. SIADiK (Sistem Arsip Digital Kepegawaian)
5.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Inovasi Lainnya	Digital	10. GAPURA SAMUDRA (Gerakan Perikanan Samubarang Dadi Reja, sebagai bentuk sinergitas pengembangan kawasan perikanan budidaya untuk menangkap peluang potensi ekonomi perikanan lokal)
		Inovasi Lainnya	Digital	11. TRAJUMASTRA (Kemitraan Maju Masyarakat Perikanan Sejahtera)
		Inovasi Lainnya	Digital	12. SOHIB (Sentra Olahan Ikan Bantul, untuk memfasilitasi pelaku usaha ikan dalam memasarkan produk olahan)
6.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pelayanan Publik	Digital	13. BANTULPEDIA (Integrasi beberapa aplikasi layanan publik secara digital berbasis Website dan Mobile/ Android & iOS)



No	PD / UPTD / UOBK	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi	Nama Inovasi	
		Tata Kelola Pemerintahan	Digital	14.	SURBAN (Aplikasi Persuratan Kabupaten Bantul)
		Pelayanan Publik	Digital	15.	Sis-Zora (Sistem Informasi Zona Kawasan Menara)
		Pelayanan Publik	Digital	16.	APLIKASI GEOPORTAL (aplikasi jenis <i>web-portal</i> yang dapat digunakan untuk mencari dan mengakses informasi geografi yang berisi data-data peta dan pelayanan geografi)
		Pelayanan Publik	Digital	17.	APLIKASI METADATA (aplikasi pemantauan dan pendampingan statistik sektoral Bantul)
		Pelayanan Publik	Digital	18.	APLIKASI PORTAL SATU DATA (Portal data terbuka Kabupaten Bantul berisi data statistik sektoral dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Bantul dan instansi vertikal di Kabupaten Bantul yang dapat diakses secara terbuka dan dikategorikan sebagai data publik)
		Pelayanan Publik	Digital	19.	SEDATA SEBANTUL (Portal resmi Satu Data Kabupaten Bantul. Akses data statistik, geospasial, publikasi, dan informasi publik Bantul secara terbuka dan terintegrasi)
		Pelayanan Publik	Digital	20.	APLIKASI PENANDA KEISTIMEWAAN MAKAM KOTAGEDE
		Pelayanan Publik	Digital	21.	APLIKASI PENANDA KEISTIMEWAAN MAKAM IMOIRI
7.	DINAS PARIWISATA	Pelayanan Publik	Digital	22.	JELAJAH BANTUL 3 in 1 (Solusi <i>Smart Public Services</i> dalam Satu Sentuhan Integrasi untuk Layanan dan Informasi Publik yang Lebih Mudah, Terpusat dan Efisien. Aplikasi ini membantu <i>traveler</i> yang ingin berkunjung ke Kabupaten Bantul ataupun DIY)
8.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pelayanan Publik	Digital	23.	GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung. Dengan inovasi GAMPIL, pengusaha terfasilitasi penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) di tempat dimana pemohon berdomisili atau lokasi terdekat tempat usahanya)
		Pelayanan Publik	Digital	24.	FAMOUS (Fasilitasi Mediasi Pemohon yang Mengurus Izin. Forum fasilitasi dan mediasi pemohon yang mengurus izin yaitu dengan mempertemukan <i>stakeholder</i> terkait, mengidentifikasi permasalahan dan sekaligus opsi-opsi penyelesaian masalah yang bisa dirumuskan)
		Pelayanan Publik	Digital	25.	GEPLAK (Gerakan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal bagi para pelaku usaha di Kabupaten Bantul)
		Pelayanan Publik	Digital	26.	LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan. Mempermudah pemohon izin dengan layanan <i>online</i> , berbasis android, dapat diunduh di <i>Play Store</i>)



No	PD / UPTD / UOBK	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi	Nama Inovasi
		Pelayanan Publik	Digital	27. SIPOT (Sistem Perizinan <i>Online</i> Terintegrasi, kemudahan dan kecepatan layanan kepada masyarakat karena penerbitan surat rekomendasi dari OPD Teknis secara otomatis dari aplikasi perizinan <i>online</i>)
		Pelayanan Publik	Digital	28. ADREM MANIS (Aplikasi Administrasi Izin Reklame Melalui GIS)
9.	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	Pelayanan Publik	Digital	29. SIPETARUNG BANTUL (Sistem Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul)
10.	DINAS SOSIAL	Pelayanan Publik	Digital	30. SIDAMESRA (Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera, memuat data kesejahteraan seluruh warga Bantul yang tujuan pembuatannya untuk memudahkan pemetaan kesejahteraan sosial warga)
11.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pelayanan Publik	Digital	31. SI JAMBUL MANDI DI KOLAM (Sistem Pinjam Buku dan Literatur Secara Mandiri Untuk Komunitas, Sekolah dan Taman Bacaan)
12.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Inovasi Lainnya	Digital	32. LESTARI DLINGO (Lestarkan Ekosistem Dan Terapkan Tani Ramah Lingkungan Inovatif Di Dlingo)
13.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelayanan Publik	Digital	33. SIGAPAN (Sistem Informasi Harga Pangan)
14.	KAPANEWON PIYUNGAN	Inovasi Lainnya	Digital	34. BERAKTING (Bersama Atasi Stunting)
15.	PUSKESMAS JETIS 1	Pelayanan Publik	Digital	35. NINGSITU PTM (<i>Screening</i> Lansia Terpadu Penyakit Tidak Menular)
16.	PUSKESMAS KRETEK	Pelayanan Publik	Digital	36. E-WARUNGKU (Elektronik Pengawasan Warung Makan-Ku)
17.	PUSKESMAS PLERET	Pelayanan Publik	Digital	37. AMBEGAN (<i>Ambulance</i> Mubeng Kalurahan)
18.	PUSKESMAS PUNDONG	Inovasi Lainnya	Digital	38. SIPAMANDU (Sistem Pengelolaan Sampah Non Organik Terpadu)
		Pelayanan Publik	Digital	39. GEPLAK MANIS DIBAWA ANDONG (Gerakan Pelaksanaan Pemberantasan Tuberkulosis Bersama Warga Masyarakat Kecamatan Pundong)
19.	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	Tata Kelola Pemerintahan	Digital	40. PEMIKAT (Pengembangan Manajemen Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Terpadu di RSUD Panembahan Senopati)
		Tata Kelola Pemerintahan	Digital	41. MADUKARA (Manajemen Terpadu Kelola Penyakit Pembuluh Darah di RSUD Panembahan Senopati Bantul)
		Tata Kelola Pemerintahan	Digital	42. SIGOOCAR (Aplikasi <i>Google Spreadsheet</i> Cancer Registry di RSUD Panembahan Senopati)



No	PD / UPTD / UOBK	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi	Nama Inovasi
20.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Pelayanan Publik	Digital	43. JARIMAS (Jaring Aspirasi Masyarakat, layanan untuk menampung aspirasi masyarakat)

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2026; diolah



Layanan Kependudukan



Layanan Kesehatan



Layanan Pemerintahan



Layanan Pendidikan
dll.



Bantulpedia

Bantul dalam Satu Genggaman
Melalui Aplikasi Bantulpedia



- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6098 Tahun 2025 tentang Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2025

SKOR: 83,64

PREDIKAT: SANGAT INOVATIF

PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH
KATEGORI KABUPATEN TERINOVATIF TAHUN 2025
SKOR: 82,87

Penghargaan/prestasi yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2025 meliputi:

No	Nama Penghargaan/Prestasi	Pemberi Penghargaan/Prestasi
1	<i>Innovative Government Award (IGA)</i> 2025 sebagai Kabupaten Terinovatif	Kementerian Dalam Negeri
2	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2025 Bappenas meraih peringkat 2	Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3	Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) khususnya Taman Masjid Agung Bantul, terstandarisasi secara nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)
4	Predikat Kualitas Tinggi (Baik) penilaian pelayanan publik	Ombudsman



No	Nama Penghargaan/Prestasi	Pemberi Penghargaan/Prestasi
5	Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, meningkat dari 88,02 menjadi 90,03 dengan Kategori "A"	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6	Peningkatan nilai AKIP dari semua komponen (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja), meningkat dari 81,27 menjadi 82,80 dengan Kategori "A"	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7	Perpustakaan Kabupaten Bantul mendapatkan Akreditasi "A" terstandar Pelayanan Publik kategori Istimewa	Perpustakaan Nasional
8	Peringkat 5 Besar Nasional dan Tertinggi DIY dalam pencapaian IPM	Badan Pusat Statistik
9	<i>Monitoring Controlling Surveillance Prevention</i> (MCSP) PERINGKAT SATU DIY	Komisi Pemberantasan Korupsi RI

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2026

**Penghargaan
Innovative
Government Awards
(IGA) Tahun 2025
Kategori Kabupaten
Terinovatif**



Demikian RLPPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, aparaturnya pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah provinsi/pusat/instansi vertikal, atas dukungan dan partisipasi, serta kinerjanya sehingga dapat mendorong keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bantul.

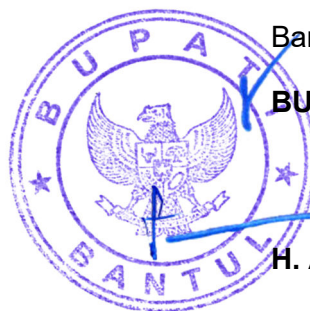
Kami menerima saran dan kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul yang lebih baik.

Akhirnya, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Bantul, 27 Maret 2026

BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH